



Pengaruh PMA, PMDN, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh

Auliya Ramadani^{1*}, Puti Andiny², Yani Rizal³, Safuridar Safuridar⁴

¹⁻⁴Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Samudra, Langsa-Aceh, Indonesia

aulyaramadani20@gmail.com^{1*}, putiandiny@unsam.ac.id², yanirizal@unsam.ac.id³, safuridar@unsam.ac.id⁴

Alamat : Jalan Prof Dr. Syarief Thayeb, Meurandeh Tengah, Langsa – Aceh, Indonesia

Korespondensi penulis: aulyaramadani20@gmail.com*

Abstract. *This study aims to analyze the effect of Foreign Direct Investment (FDI), Domestic Direct Investment (DDI) and Government Expenditure on economic growth in Aceh Province. In this analysis using multiple linear regression analysis models using eviews 10 software. The data used is secondary data (time series) taken from 2009-2023 for 15 years sourced from BPS (Central Bureau of Statistics) Aceh Province. The results of this study indicate that Foreign Direct Investment (FDI) has a probability value of $0.0595 > 0.05$, it can be concluded that FDI has no significant effect on economic growth in Aceh Province. Domestic Investment (PMDN) has a probability value of $0.9494 > 0.05$, it can be concluded that PMDN has no significant effect on economic growth in Aceh Province. Government spending has a probability value of $0.6689 > 0.05$, it can be concluded that government spending has no effect on economic growth in Aceh Province.*

Keywords: FDI, DDI, Government Expenditure, Economic Growth.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Pengeluaran Pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Dalam analisis ini menggunakan model analisis regresi linier berganda dengan menggunakan *software eviews 10*. Adapun data yang digunakan adalah data sekunder (*time series*) yang diambil dari tahun 2009-2023 selama 15 tahun yang bersumber dari BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi Aceh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penanaman Modal Asing (PMA) memiliki nilai probabilitas $0,0595 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa PMA tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) memiliki nilai probabilitas sebesar $0,9494 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa PMDN tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Pengeluaran Pemerintah memiliki nilai probabilitas sebesar $0,6689 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.

Kata kunci : PMA, PMDN, Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi.

1. LATAR BELAKANG

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator perekonomian suatu negara dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode berikutnya. Pertumbuhan ekonomi akan meningkat disebabkan oleh faktor-faktor produksi yang selalu mengalami penambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Untuk memberikan suatu gambaran kasar mengenai pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara, ukuran yang selalu digunakan adalah tingkat pertumbuhan pendapatan nasional riil yang dicapai (Prasasti, 2022)

Pertumbuhan ekonomi adalah bagian dalam suatu proses perubahan perekonomian disuatu negara yang berkelanjutan menuju kearah yang lebih baik dibandingkan dengan kondisi

sebelumnya. Adanya perubahan kondisi perekonomian terjadi ketika adanya aktivitas ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan pencapaian pada periode sebelumnya. Pembangunan di daerah mencapai keberhasilannya merupakan cerminan dari tingkat pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Maka dari itu, setiap daerah perlu memiliki sasaran tingkat pertumbuhan ekonomi sebagai bagian dari perencanaan dan tujuan pembangunan di daerahnya masing-masing (Suherman et al., 2021).

Pertumbuhan ekonomi di setiap negara dan provinsi bervariasi. Kinerja ekonomi Aceh dapat dianalisis melalui angka pertumbuhan yang diukur dengan laju peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) (Fatimatuzahra et al., 2019) Untuk mengevaluasi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh, dapat dilihat pada tabel 1 berikut yang menunjukkan persentase PDRB Provinsi Aceh pada tahun 2018 – 2023.

Tabel 1. Persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Aceh Tahun 2018-2023

Tahun	PDRB (%)
2018	4,61%
2019	4,14%
2020	-0,37%
2021	2,81%
2022	4,21%
2023	4,23%

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh

Berdasarkan pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi tertinggi di Provinsi Aceh pada tahun 2018, kenaikan ini terlihat di sektor migas dan non-migas. Di sektor migas, pertumbuhan produksi tertinggi terjadi pada usaha penyedia akomodasi serta makanan dan minuman, seperti coklat dan kopi. Sementara itu, di sektor perdagangan, khususnya ekspor luar negeri, komoditas batu bara juga mengalami peningkatan. Di sektor non-migas, terdapat kenaikan nilai tambah di bidang konstruksi, dan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan konsumsi pemerintah juga dapat terlihat (AcehProv, 2018). Tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Aceh menunjukkan tren positif, meskipun ada sedikit penurunan dari 4,61% ke 4,14%. Hal ini mengindikasikan adanya stabilitas ekonomi yang relatif baik sebelum terjadinya krisis. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi di Aceh terjadi kontra ekonomi yang signifikan dengan pertumbuhan ekonomi -0,37% . Pertumbuhan ekonomi kembali negatif disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang menghantam seluruh dunia, termasuk Aceh. Sektor- sektor ekonomi utama seperti pariwisata dan perdagangan mengalami penurunan yang tajam. Pada tahun 2021 pemulihan mulai terlihat dengan pertumbuhan 2,81%, meskipun masih dibawah tingkat pra-pandemi. Upaya pemulihan ekonomi dan stimulus dari pemerintah mungkin berkontribusi pada

pertumbuhan ini. Dan pada tahun 2022-2023 pertumbuhan kembali menunjukkan tren positif dengan angka 4,21% dan 4,23%. Hal ini menunjukkan bahwa Aceh mulai pulih dari dampak pandemi dan berusaha untuk kembali ke jalur pertumbuhan yang lebih baik.

Investasi dan pengeluaran pemerintah merupakan dua faktor yang sering dikaitkan dengan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, diperlukan adanya investasi baru yang berfungsi sebagai stok modal. Investasi ini dapat berasal dari sektor swasta dalam bentuk penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing, serta pengeluaran pemerintah yang mencakup belanja modal, belanja barang dan jasa, atau kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta. Pembentukan investasi ini dianggap salah satu faktor kunci dalam pembangunan ekonomi. Sebagai contoh, investasi dalam peralatan modal atau pembentukan modal dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Oleh karena itu, terdapat hubungan yang positif antara pembentukan investasi dan pertumbuhan ekonomi disuatu negara.

UU No 1 Tahun 1967 dan UU No 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Asing (PMA) adalah Penanaman Modal Asing secara langsung yang dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini mengacu pada investasi yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia. Dalam hal ini, pemilik modal secara langsung menanggung resiko yang terkait dengan investasi tersebut. Tujuan utama dari PMA adalah untuk memperoleh keuntungan dari investasi tersebut, sekaligus berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di negara yang menerima investasi. PMA dapat meningkatkan investasi dalam sektor infrastruktur, fasilitas produksi, dan teknologi. Peningkatan ini berpotensi meningkatkan produksi barang dan jasa, yang kemudian dapat mendorong pertumbuhan ekonomi (Fatimah et al., 2022).

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang terkandung dalam UU No 25 Tahun 1997 tentang penanaman modal adalah kegiatan investasi yang dilakukan penanam modal domestik untuk menjalankan usaha di wilayah Indonesia, dengan memanfaatkan modal dari dalam negeri. Penanam modal merupakan langkah awal dalam proses pembangunan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan langkah awal dalam proses pembangunan ekonomi suatu negara. Presensi PMDN terus menunjukkan pertumbuhan, yang sejalan dengan harapan untuk peningkatan pendapatan nasional melalui inisiatif dan strategi investor yang berkolaborasi dengan pemerintah. Peningkatan PMDN dalam perekonomian Indonesia harus terus dipromosikan untuk mendorong perkembangan ekonomi nasional yang berasal dari investor domestik melalui kerjasama dengan pemerintah pusat (Tamba et al., 2023).

Selain investasi terdapat pengeluaran pemerintah yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketika kontribusi sektor swasta menurun, pemerintah berpotensi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dengan meningkatkan jumlah pengeluaran pemerintah. Peningkatan pengeluaran pemerintah ini dapat memacu pertumbuhan di berbagai sektor lainnya. Menurut Sukirno (2004), pengeluaran pemerintah adalah bagian dari kebijakan fiskal yaitu tindakan pemerintah yang bertujuan untuk mengelola perekonomian dengan menetapkan angka tahunan untuk pendapatan dan belanja, sebagaimana dirinci dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Tujuan dari kebijakan fiskal adalah untuk menjaga stabilitas harga, tingkat output, dan kesempatan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, pengeluaran pemerintah memainkan peran penting dalam mempercepat perekonomian. Jika perekonomian berjalan dengan baik, hal ini akan membuka lebih banyak peluang kerja atau usaha di dalamnya (Bawinti et al., 2018). Disisi lain, pengeluaran pemerintah baik dalam bentuk pembangunan infrastruktur maupun penyediaan layanan publik, dapat menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Berikut tabel 2 yang menunjukkan realisasi PMDN dan pengeluaran pemerintah provinsi Aceh yang telah berjalan 5 tahun terakhir.

Tabel 2. Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Pengeluaran Pemerintah Menurut Provinsi Aceh Tahun 2019-2023

Tahun	PMA (Rupiah)	PMDN (Rupiah)	Pengeluaran Pemerintah (Rupiah)
2019	1.196,941	3.606,900	23.356,670
2020	7.379,740	8.241,900	22.204,490
2021	2.968,016	7.904,700	22.758,270
2022	1.833,050	4.424,200	22.319,770
2023	248.638,068	8.883,300	22.293,140

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa perkembangan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) Provinsi Aceh tahun 2019-2023 dalam pergerakan yang fluktuatif. Dimulai dari tahun 2019 realisasi PMA sebesar Rp.1.196,941. Lalu ditahun 2020 PMA mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp.7.379,740. Tahun 2021 PMA mengalami penurunan sebesar Rp.2.968,016. Kemudian pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp.1.833,050. Dan pada tahun 2023 mengalami penurunan kembali sehingga menjadi sebesar Rp.248.638,068.

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Provinsi Aceh tahun 2019-2023 cenderung mengalami fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 2019 PMDN sebesar Rp. 3.606,900. Kemudian pada tahun 2020 PMDN naik

menjadi Rp. 8.241,900. Tahun 2021 PMDN mengalami penurunan sebesar Rp. 7.904,700. Pada tahun 2022 PMDN mengalami penurunan kembali menjadi sebesar Rp.4.424,200. Dan selanjutnya pada tahun 2023 PMDN mengalami peningkatan kembali sebesar Rp. 8.883,300.

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa pengeluaran pemerintah pada provinsi Aceh juga mengalami fluktuasi dari tahun 2019-2023. Pada tahun 2019 pengeluaran pemerintah di provinsi Aceh sebesar Rp. 23.356,670. Tahun 2020 menurun menjadi Rp. 22.204,490. Kemudian pada tahun 2021 pengeluaran pemerintah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp. 22.758,270. Pada tahun 2022 pengeluaran pemerintah pada provinsi Aceh mengalami penurunan sebesar 22.319,770. Tahun berikutnya yaitu pada tahun 2023 mengalami penurunan kembali menjadi sebesar Rp. 22.293,140.

Di Provinsi Aceh, pengeluaran pemerintah telah menjadi salah satu motor penggerak utama dalam pertumbuhan ekonomi, terutama setelah otonomi khusus yang diberikan kepada provinsi ini. Selain itu, peningkatan minat investasi domestik dalam sektor – sektor utama seperti pertanian, perikanan, dan energi diantisipasi akan berdampak positif terhadap kinerja ekonomi Aceh. Meskipun demikian potensi pertumbuhan ekonomi ini besar, masih terdapat berbagai tantangan, seperti rendahnya tingkat produktivitas dan hambatan birokrasi, yang dapat mempengaruhi efektivitas PMA, PMDN dan pengeluaran pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis “**Pengaruh PMA, PMDN dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Aceh**”. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan bukti empiris mengenai sejauh mana kedua variabel tersebut mempengaruhi dinamika ekonomi di Aceh, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat untuk mempercepat pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah ini.

2. KAJIAN TEORITIS

Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno (2016) pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Pertumbuhan ekonomi menjadi masalah makro ekonomi jangka panjang dikarenakan satu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat disebabkan oleh faktor-faktor produksi yang akan selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah jumlah barang modal, teknologi berkembang dan disamping itu tenaga kerja bertambah seiring bertambahnya penduduk.

Dalam teori Keynesian, permintaan agregat masyarakat menentukan kondisi ekonomi makro. Apabila permintaan agregat melebihi penawaran agregat pada periode tertentu, maka akan terjadi kondisi ‘kekurangan output’. Sedangkan, apabila permintaan agregat lebih rendah dari penawaran agregat, maka kondisi ‘kelebihan output’ yang akan terjadi. Selanjutnya, permintaan agregat diartikan sebagai jumlah dari semua pengeluaran masyarakat untuk barang dan jasa dalam satu tahun tertentu. Terdapat tiga komponen yang membentuk permintaan agregat, yaitu konsumsi rumah tangga (C), investasi perusahaan (I), dan pengeluaran pemerintah (G); di mana pemerintah bisa memengaruhi permintaan agregat secara langsung melalui pengeluaran pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa selain daripada konsumsi rumah tangga, dalam skala makro, investasi dan pengeluaran pemerintah merupakan dua hal yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. (Saputri, K. D & Ananda, C. F., 2023)

PMA

Penanaman Modal Asing (PMA) menurut Undang-Undang RI No 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal (2007:2) adalah suatu aktivitas menanam modal yang dilakukan untuk melaksanakan usaha di Negara Republik Indonesia, kegiatan tersebut dilakukan oleh para penanam modal asing (PMA) menggunakan modal asing ataupun dengan melakukan berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Penanaman modal dalam negeri dapat dikatakan juga sebagai kegiatan menanam modal di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan secara perorangan oleh warga negara asing atau dapat juga dilakukan oleh pemerintah asing.

Menurut Irawan dan Suparmoko (2002:41), Penanaman Modal Asing (PMA) atau investasi asing yaitu kegiatan investasi yang dilakukan oleh para pemilik modal asing didalam negara Republik Indonesia sehingga para pemilik modal tersebut mendapatkan keuntungan dari usaha yang dijalankan tersebut. Penanaman Modal Asing (PMA) ialah suatu kegiatan menanam modal yang dilakukan wilayah negara Indonesia dan memakai modal asing ataupun dengan cara berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

PMDN

Menurut Undang-Undang Penanaman Modal No.25 Tahun 2007, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan modal dalam negeri (Aji et al., 2023). Pihak yang termasuk Penanam

Modal Dalam Negeri yaitu (a) perorangan warga Negara Indonesia, (b) Badan Usaha Indonesia, dan (c) Badan Hukum Indonesia (Magdalena & Suhatman, 2020). Manfaat dari Penanaman Modal Negeri adalah (a) mampu menghemat devisa, (b) mengurangi ketergantungan terhadap produk asing, (c) mendorong kemajuan industry dalam negeri melalui keterkaitan ke depan dan ke belakang, dan (d) memberikan kontribusi dalam upaya penyerapan tenaga kerja. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan investasi yang memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi negara. Kedudukan Penanaman Modal Dalam Negeri yang terpenting adalah pendapatan nasional karena dapat memanfaatkan kekayaan yang dimiliki oleh pihak. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dianggap mampu mendorong perekonomian suatu Negara berkembang dengan sangat baik, dimana jika investasi yang terjadi di dalam Negeri mengalami peningkatan maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Aji et al., 2023).

Pengeluaran Pemerintah

Menurut Sukirno (2015) Pengeluaran Pemerintah adalah seperangkat produk yang dihasilkan yang memuat pilihan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyediakan barang-barang publik dan pelayanan kepada masyarakat. Pengeluaran pemerintah (*Government Expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah atau wilayah.

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Perkembangan pengeluaran pemerintah dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahapan-tahapan pembangunan ekonomi yaitu tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, menurut mereka rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional relatif besar. Hal ini dikarenakan pada tahap ini persentase Investasi swasta pemerintah terhadap total Investasi swasta besar sehingga pemerintah harus menyediakan berbagai sarana dan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi dan sebagainya (Eliza, 2015).

3. METODE PENELITIAN

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah kajian ekonomi yang meneliti tentang PMDN dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Aceh. Penelitian ini merupakan analisis deskriptif kuantitatif, menggunakan data sekunder. Data tersebut tersebut yaitu data *time series* selama 15 tahun, berupa PMDN, Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan *software* *eviews* 10 untuk melihat adanya Pengaruh PMDN dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh, adapun model regresi berganda sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana :

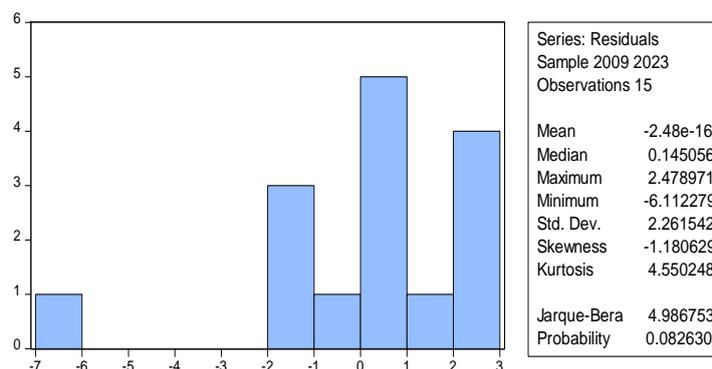
- Y = Pertumbuhan Ekonomi
- α = Konstanta
- X_1 = PMA
- X_2 = PMDN
- X_3 = Pengeluaran Pemerintah
- E = Error

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas



Sumber : estimate *Eviews* 10

Dari uji *normalitas* tersebut diperoleh bahwa nilai *Jarque-Bera* sebesar 4.986753 dan *probability* sebesar 0,082630 dengan α 0,05. Maka dapat disimpulkan $probability > \alpha$ yaitu $0,082630 > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang artinya variabel PMA, PMDN dan

Pengeluaran Pemerintah berdistribusi secara normal terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.

b. Uji Multikolinieritas

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
PMA	7.84E-05	2.470192	1.021602
PMDN	2.24E-07	1.228558	1.117993
PENGELUARAN PEMERINTAH	0.002688	1.159889	1.139923

Sumber : estimate Eviews 10

Berdasarkan uji *multikolinieritas* diatas dapat dilihat bahwa nilai *Centered VIF* untuk variabel PMA, PMDN dan Pengeluaran Pemerintah yaitu < 10 . Maka dapat disimpulkan bahwa asumsi uji *multikolinieritas* sudah terpenuhi atau tidak ada masalah multikolinieritas dalam model tersebut.

c. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

F-statistic	0.528762	Prob. F(9,5)	0.8086
Obs*R-squared	7.314672	Prob. Chi-Square(9)	0.6044
Scaled explained SS	6.982749	Prob. Chi-Square(9)	0.6389

Sumber : estimate Eviews 10

Dari uji heteroskedastisitas nilai p-value pada *probability C-Square* sebesar $0.6044 > 0,05$. Sehingga dinyatakan tidak mengalami masalah pada *heteroskedastisitas*.

d. Uji Autokorelasi

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi

F-statistic	1.225555	Prob. F(2,9)	0.3383
Obs*R-squared	3.210749	Prob. Chi-Square(2)	0.2008

Sumber : estimate Eviews 10

Uji Autokorelasi dengan nilai *probability chi-square* yang merupakan nilai p-value uji *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM*, yaitu sebesar 0.2008 dimana $> 0,05$ sehingga dapat disimpulkan H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya tidak ada masalah *autokorelasi*.

Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 7. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.624434	1.054601	0.592104	0.5658
PMA	0.018603	0.008854	2.101225	0.0595
PMDN	-0.000103	0.000473	-0.218067	0.8314
PENGELUARAN PEMERINTAH	0.047210	0.051848	0.823749	0.4276
R-squared	0.298989	Mean dependent var		2.319333
Adjusted R-squared	0.107804	S.D. dependent var		4.932300
F-statistic	1.563875	Durbin-Watson stat		1.612476
Prob(F-statistic)	0.253635			

Sumber : estimate Eviews 10

2. Uji Hipotesis

a. Uji Parsial (Uji-t)

Hasil estimasi diketahui bahwa :

Variabel PMA menunjukkan nilai *t-statistic* sebesar 2,101225 dengan nilai *probability* signifikansi sebesar 0,0595 dimana $> 0,05$. Sehingga PMA tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi.

Variabel PMDN menunjukkan nilai *t-statistic* sebesar -0.218067 dengan nilai *probability* signifikansi sebesar 0.8314 dimana $> 0,05$. Sehingga PMDN tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi.

Variabel Pengeluaran Pemerintah menunjukkan nilai *t-statistic* sebesar 0.823749 dengan nilai *probability* signifikansi sebesar 0.4276 dimana $> 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pengeluaran Pemerintah tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi.

b. Uji Simultan (Uji-F)

Diketahui bahwa nilai *F-Statistic* adalah 1,563875 dengan nilai *probability F-Statistic* sebesar 0,253635 dimana lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel PMA, PMDN dan Pengeluaran Pemerintah tidak memiliki pengaruh secara simultan terhadap laju pertumbuhan ekonomi.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Diketahui nilai R-Square sebesar 0,298989 artinya variasi seluruh variabel independen yaitu PMA, PMDN dan Pengeluaran Pemerintah dapat mempengaruhi variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 29,8989%. Sedangkan sisanya sebesar 70,1011% (0,701011) dipengaruhi oleh variabel lain diluar model.

Pembahasan

Pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Penanaman Modal Asing (PMA) memiliki pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Hal ini dapat dilihat dari nilai *coefficient* sebesar 0,018603. Serta nilai *probability* yang diperoleh sebesar $0,0595 > 0,05$. Artinya jika terjadi peningkatan penanaman modal asing sebesar 1 persen, maka pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh juga akan mengalami peningkatan yang tidak signifikan sebesar 0,018603. Sebaliknya jika terjadi penurunan penanaman modal asing sebesar 1 persen, maka pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh akan mengalami penurunan yang tidak signifikan sebesar 0,018603 persen dalam setahun. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh berpengaruh positif namun tidak signifikan. PMA berpengaruh tidak signifikan disebabkan oleh rendahnya kualitas dan produktivitas sumber daya manusia, yang mengakibatkan rencana alih teknologi tidak terlaksana dengan baik. Selain itu, infrastruktur pendukung untuk kegiatan ekspor dan impor yang masih terbatas, serta meningkatnya persaingan dalam menarik investasi asing dari negara maju maupun berkembang juga berkontribusi terhadap kondisi ini.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Muryanto et al., (2022), Hasanuddin & Roy, (2022), Muhammad et al., (2021), Tajuddin, (2021), (Akbar, 2022) yang menyatakan bahwa Penanaman Modal Asing berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian oleh Kurniawati & Islami, (2022) dan Meliani et al., (2021) yang menunjukkan bahwa Penanaman Modal Asing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Hal ini dilihat dari nilai *coefficient* sebesar -0,001456. Serta nilai *probability* yang diperoleh sebesar $0,9494 > 0,05$. Pengaruh PMDN terhadap pertumbuhan ekonomi bersifat invers atau berbanding terbalik. Artinya jika

terjadi peningkatan PMDN hal ini akan berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Sebaliknya, penurunan PMDN dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi di provinsi Aceh meningkat. Hasil temuan diatas sesuai dengan pendapat Keynes, yang menyatakan tingkat kegiatan ekonomi tidak ditentukan oleh pembentukan modal, bahkan peran investasi atau pembentukan modal dalam teorinya diabaikan sama sekali. Dalam analisisnya Keynes lebih menekankan kebijakan fiskal, Keynes beranggapan dengan kebijakan fiskal pemerintah dianggap bisa mempengaruhi jalannya perekonomian. PMDN berpengaruh negatif dan tidak signifikan disebabkan oleh masih rendahnya kualitas SDM, masih adanya praktek pungutan liar (pungli). Termasuk juga masih rumitnya pengurusan izin usaha, kebijakan pemerintah terkait perizinan cenderung berubah-ubah/tumpang tindih (*overlapping*), serta terbatasnya distribusi pemasaran produk dan ukuran pasar (*market size*). Melalui identifikasi berbagai faktor yang menghalangi penanaman modal di daerah, serta dengan sejumlah rekomendasi yang signifikan, diharapkan dengan tercipta kebijakan baru atau perubahan kebijakan yang efektif dalam mengatasi berbagai kendala investasi di Provinsi Aceh.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahyono, (2017), (Tajuddin, 2021), Indah Dela Puspitasari et al., (2024) yang menyatakan bahwa PMDN tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Muryanto et al., (2022) dan Dan et al., (2024) yang menyatakan bahwa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pengeluaran Pemerintah memiliki pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Hal ini dilihat dari nilai *coefficient* sebesar 0,026356. Dan nilai *probability* yang diperoleh sebesar $0,6689 > 0,05$. Artinya setiap peningkatan pengeluaran pemerintah tidak selalu berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya tidak semua penurunan pengeluaran akan mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah tidak memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini bisa disebabkan bahwa pengeluaran pemerintah, baik untuk investasi maupun pembangunan infrastruktur, tidak memberikan efek langsung. Meskipun alokasi dana untuk infrastruktur dapat memicu semangat pelaku ekonomi untuk mengembangkan usaha mereka. Sehingga dampak pembangunan infrastruktur tersebut akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dimasa mendatang.

Hasil tersebut didukung oleh penelitian Wihda, B.M., & Poerwono, D. (2014), Kurniawan et al., (2018), Putra, (2022) dan Rosmawati & Arisman, (2020) yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Najmi et al., (2022) dan Fadillah & Anis, (2020) yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian mengenai pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Pengeluaran Pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh dari tahun 2009 hingga 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. **Penanaman Modal Asing (PMA)** memiliki pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Dengan nilai koefisien 0.018603 menunjukkan bahwa jika terjadi peningkatan penanaman modal asing sebesar 1 persen, maka pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh juga akan mengalami peningkatan yang tidak signifikan. Sebaliknya jika terjadi penurunan penanaman modal asing sebesar 1 persen, maka pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh akan mengalami penurunan yang tidak signifikan.
2. **Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)** memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Dengan nilai koefisien - 0.001456 menunjukkan hubungan berbanding terbalik. Dimana peningkatan PMDN akan berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh dan begitu juga sebaliknya.
3. **Pengeluaran Pemerintah** memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Dengan nilai koefisien 0,026356 hal ini menunjukkan meskipun terdapat peningkatan dalam pengeluaran pemerintah, tidak menjamin adanya kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
4. Secara simultan variabel Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan pengeluaran pemerintah secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.

Pemerintah perlu melakukan evaluasi komprehensif terhadap kebijakan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang berlaku saat ini. Upayakan untuk menarik investasi yang memberikan dampak positif yang lebih besar terhadap produktivitas dan pertumbuhan

ekonomi, terutama di sektor-sektor yang memiliki potensi tinggi. Meskipun pengeluaran pemerintah menunjukkan pengaruh positif, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa alokasi dana dilakukan dengan efisien dan tepat sasaran. Program-program yang dilaksanakan harus memiliki tujuan yang jelas, terukur, dan dapat dihubungkan secara langsung dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi

DAFTAR REFERENSI

- Aji, G., Salsabila, P. T., Stiqomah, M. N., & Ningrum, M. (2023). Analisis PMDN, PMA, inflasi dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi Akutansi Dan Manajemen*, 1(3), 250–267.
- Akbar, A. F. Al. (2022). Analisis pengaruh penanaman modal asing (PMA), penanaman modal dalam negeri (PMDN), dan angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten pada periode tahun 2017-2020. *POPULER: Jurnal Penelitian Mahasiswa*, 1(4), 142–154.
- Bawinti, I., Kawung, G. M. V., & Luntungan, A. Y. (2018). Pengaruh pengeluaran pemerintah dan investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(04), 23–33.
- Cahyono, H. (2017). Pengaruh PMDN, PMA dan belanja daerah Jawa Timur terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya dan Kabupaten Banyuwangi. *Media Trend*, 12(1), 63–75. <https://doi.org/10.21107/mediatrend.v12i1.2538>
- Dan, P., Kerja, T., & Ekonomi, P. (2024). *Jdess* 03.02.2024. 3(2), 362–374.
- Eliza, Y. (2015). Pengaruh investasi, angkatan kerja dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Pekbis*, 7(3), 200–210.
- Fadillah, M., & Anis, A. (2020). Pengaruh investasi (PMDN), angkatan kerja, pengeluaran pemerintah dan pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 2(3), 63. <https://doi.org/10.24036/jkep.v2i3.12680>
- Fatimah, K., Amalia, H., V., & Panggiarti, E. K. (2022). Analisis pengaruh penanaman modal asing (PMA) terhadap pertumbuhan ekonomi. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 1, 68–76.
- Fatimatuzahra, Kadir, I. A., & Zakiah. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh periode 2003-2018. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian*, 4(4), 273–282.
- Keynes, J. M. (1936). *The general theory of employment, interest and money*. Palgrave Macmillan.
- Kurniawan, A. I., Militina, T., & Suharto, R. B. (2018). Pengaruh investasi swasta dan pengeluaran pemerintah serta tenaga kerja terhadap pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi. *Inovasi*, 13(2), 82. <https://doi.org/10.29264/jinv.v13i2.2453>

- Kurniawati, D. L., & Islami, F. S. (2022). Analisis pengaruh PMA, PMDN dan ekspor migas-nongas terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 2(1), 13–28. <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v2i1.98>
- Meliani, A. M., Widodo, S., & Hariani, E. (2021). Analisis pengaruh penanaman modal asing (PMA), penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur tahun 2009-2019. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 5(3), 526–535. <https://doi.org/10.22219/jie.v5i3.18153>
- Muhammad, A. S., Tyas, H. S., Puspitasari, C., Faradina, J., & Sumardjono. (2021). Binaan pascasarjana Unpas Universitas Pasundan Bandung. *Jurnal Sosiohumaniora Kodepena: Information Center for Indonesian Social Sciences*, 2(November), 223–240.
- Muryanto, T. D., Farida, Y., Ulinuha, N., Khaulasari, H., & Yuliati, D. (2022). Pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. *Jurnal Matematika Integratif*, 18(2), 157. <https://doi.org/10.24198/jmi.v18.n2.40732.157-166>
- Najmi, I., Adi, A. R., & Zulha, A. M. (2022). Pengaruh pengeluaran pemerintah, tenaga kerja dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Basis Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2), 18–36. <https://doi.org/10.22373/jibes.v1i2.1680>
- Prasasti, D. (2022). Pengaruh investasi, tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten & Kota Sulawesi Selatan. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 6(3), 478–490. <https://doi.org/10.22219/jie.v6i3.22280>
- Puspitasari, I. D., Telaumbanua, S. T., Nahampun, M. K., Gultom, U., & Sihotang, A. R. (2024). Pengaruh penerimaan pajak, PMA dan PMDN terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara. *JAE (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 9(1), 142–149. <https://doi.org/10.29407/jae.v9i1.21959>
- Putra, H. H. (2022). Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah, konsumsi rumah tangga dan net-ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 6(2), 251–258. <https://doi.org/10.22219/jie.v6i2.20479>
- Rosmawati, S., & Arisman, A. (2020). Pengaruh tingkat pendidikan, jumlah penduduk dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Batang Hari. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 419. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.185>
- Sukirno, S. (2004). *Makro ekonomi edisi ketiga*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, S. (2015). *Makroekonomi teori pengantar*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Suparmoko, I. (2002). *Ekonomi pembangunan*. BPFE.
- Tajuddin, I. (2021). The influence of inflation, domestic investment and foreign investment on economic growth. *Point of View Research Economic Development*, 2(2), 65–79.
- Tamba, A. V., Purba, M. L., & Sihotang, J. (2023). Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah, penanaman modal dalam negeri, dan penanaman modal asing terhadap produk domestik bruto di Indonesia periode 2000–2020. *Jurnal KAFEBIS*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.51622/kafebis.v1i1.2008>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing (PMA).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.